

DAMPAK PERANG MAKASSAR TERHADAP UMAT ISLAM SULAWESI SELATAN ABAD XVII-XVIII

Ahmad Yani

Pasca Sarja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: *ahmadyaniuinam4459@gmail.com*

Abstract

This paper examines the continuation of the Makassar War between the Makassar sultanate and the Dutch VOC. The trigger factor was the internal conditions of the people of Islamic kingdoms in South Sulawesi which also affected the conflict or the Makassar War. Strategic geographical conditions are in the middle of the shipping and trade routes between Maluku in the East and Batavia and Malacca in the west; the cultural conditions of the local people who are known to be hard and brave (*de hantjens van het Oesten*) are as hard as the nature of the Dutch, the political conditions of the local community which are covered by competition in obtaining superiority among them. Such things became a source of conflict which later led to a devastating war known as the Makassar War. The Makassar War was a war that had been experienced by the Dutch VOC in Southeast Asia which ended with a Dutch VOC victory against the Makassar sultanate.

Keyword: Impact, War, Makassar and Muslims

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang keberlangsungan Perang Makassar antara kesultanan Makassar dengan VOC Belanda. Faktor yang menjadi pemicu adalah kondisi internal masyarakat dari kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi Selatan turut mempengaruhi konflik atau Perang Makassar. Keadaan geografis yang strategis berada pada pertengahan jalur pelayaran dan perdagangan antara Maluku di Timur dan Batavia dan Malaka di barat; kondisi kultural masyarakat setempat yang dikenal keras dan berani (*de hantjens van het Oesten*) sama kerasnya dengan tabiat orang Belanda, kondisi politik masyarakat setempat yang diliputi kompetisi dalam memperoleh superioritas diantara mereka. Hal-hal demikian menjadi sumber konflik yang kelak menimbulkan perang yang dahsyat yang dikenal dengan Perang Makassar. Perang Makassar merupakan perang yang pernah dialami oleh VOC Belanda di Asia Tenggara yang berakhir dengan kemenangan VOC Belanda terhadap kesultanan Makassar.

Kata Kunci: Dampak, Perang, Makassar dan Umat Islam

A. Pendahuluan

Perang Makassar yang berlangsung 1666-1669 M. merupakan salah satu perang yang paling berat dihadapi VOC di Nusantara pada abad ke XVII M., merupakan refleksi dari kompetisi antara Kesultanan Makassar dengan VOC dalam dunia perdagangan. Adapun yang menjadi objek persaingan adalah rempah-rempah dari Kepulauan Maluku. Rempah-rempah pada saat itu, merupakan komoditi dagang yang paling laku dan sangat di butuhkan di Eropa.

Banda sebagai pusat rempah-rempah di Kepulauan Maluku pada tahun 1607 M. mengizinkan Makassar membuka kantor perwakilan dagang di sana. Para pedagang Makassar juga punya strategi memikat hati penguasa Banda dengan menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh mereka. Kenyataan demikian membuat Makassar bisa memperoleh rempah-rempah dari Maluku dalam jumlah besar dan murah sehingga harga jual rempah-rempah di Makassar lebih murah dibandingkan di daerah asalnya di Maluku.¹

Hal tersebut tentu saja, membuat Somba Opu sebagai bandar Makassar menjadi ramai dikunjungi oleh para pedagang Eropa yang membutuhkan rempah-rempah, seperti Portugis, Inggris, Spanyol dan lain-lain. Dengan demikian, Makassar menjadi pemasok rempah-rempah terhadap pasaran Eropa. Kenyataan tersebut membuat Kesultanan Makassar sebagai bandar niaga yang besar. Selain itu, yang tak kalah hebat adalah penguasa Makassar menganut sistem perdagangan bebas (*mare liberium*). Kebijakan tersebut sarat dengan nilai keislaman. Lautan merupakan salah satu tanda kebesaran Tuhan dan merupakan fasilitas yang dianugerahkan kepada anak cucu Adam (umat manusia) guna dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka, bukan untuk satu bangsa saja. Nikmat tersebut tentu harus disyukuri bukan sebaliknya bersifat rakus dengan melarang yang lainnya untuk mengambil manfaat dari nikmat tersebut.²

Di sisi lain VOC juga berusaha semaksimal mungkin untuk menyediakan rempah-rempah bagi pasaran Eropa dengan jalan memonopoli pelayaran dan perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Keberhasilan Makassar tersebut, tentu saja membuat VOC Belanda merasa jengkel, karena ancaman bagi kepentingan monopoli ekonomi perdagangan rempah-rempahnya di Kepulauan Maluku. Begitupun sebaliknya, Makassar menganggap VOC sebagai ancaman atas kepentingan pelayaran dan perdagangannya di Kepulauan Maluku. Demikianlah persaingan kepentingan antara dua kubu tersebut melahirkan konflik sosial yang dikenal dengan Perang Makassar. Perang tersebut berakhir dengan kekalahan kesultanan Makassar.

¹Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, h. 29.

²Baca QS al-Isrā'/17: 70&QS al-Jāsiyah/45: 12.

A. Kondisi Umat Islam pra Perang Makassar

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Sulawesi Selatan yang terdiri dari daratan dan lautan dengan segala kekayaan alam di dalamnya merupakan anugerah Ilahi bagi masyarakat setempat. Namun, suatu hal yang paling menarik bagi wilayah setempat adalah letaknya yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan rempah-rempah yang bisa menghubungkan antara Malaka di barat dengan Maluku di timur.

Bagi masyarakat setempat wilayah mereka yang strategis merupakan anugerah Tuhan yang harus dipertahankan. Sedangkan, bagi pihak luar yang punya kepentingan itu merupakan wilayah yang harus direbut (ditaklukkan). Kondisi geografis inilah yang dilirik dan disadari oleh VOC sehingga berusaha untuk direbut pada abad ke XVII M. yang berujung pada peperangan besar yang dikenal dengan Perang Makassar. Daya tarik Sulawesi Selatan, khususnya Makassar bagi VOC tercermin dari catatan Belanda tertanggal 27 Oktober 1625 M. yang menyatakan bahwa:

Sejak kita (Belanda) berlayar di perairan sekitar Malaka, kota Makassar telah berkembang pesat dan mengenai perdagangan di wilayah Timur ini, seperti Kalimantan, Jawa, Solor, Timor, Ambon, Kepulauan Maluku dan tempat-tempat lain, lokasi Makassar jauh lebih baik daripada Malaka.³

2. Kondisi Sosial-Budaya

Sesungguhnya, inti dari karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan terletak pada *siri'* yang menjadi pendorong untuk berbuat. *Siri'* tersebut ditopang oleh apa yang disebut dengan *pessé* (Bugis) *paccé* (Makassar) yang menjadi alat untuk memperkokoh kebersamaan atau solidaritas bersama dalam masyarakat. Bahkan, A. Rahman Rahim dalam penelitian disertasi doktornya dengan judul; Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis menyatakan *siri'* sebagai salah satu dari nilai utama dalam kebudayaan Bugis.⁴ Sesungguhnya, dalam pandangan masyarakat Sulawesi Selatan bahwa, memiliki *siri'* menjadi salah satu indikasi keberuntungan seseorang.

Nasihat Kajaoé (Laliddong) kepada anak cucunya: bersifat manusialah lagi baik perasaan hati, sebagaimana nasihat orang tua dahulu bahwa ada enam ciri-ciri manusia dikatakan beruntung, kesemua ciri-ciri itu bersumber pada hati, pertama, jujur, kedua, berkata benar, ketiga, keteguhan, keempat, *siri'* (malu), kelima, kecerdasan, keenam, keberanian.⁵

³Suriadi Mappangara, *Sejarah Islam Sulawesi Selatan*, h. 57.

⁴A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h.138-144.

⁵*Lontarak Bélawa*, h. 16. Diartikan secara bebas oleh penulis.

Siri' secara bahasa berarti malu. B.F. Matthes di dalam kamusnya mencatat arti *siri'* dengan tujuh buah kata di dalam bahasa Belanda yaitu: *beschaamd, shroomvallig, verlegen, schaamte, eergevoel, schande, wangunst*, berarti: amat malu, dengan malu, malu sebagai kata sifat atau keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan harga diri, noda atau aib, dengki.⁶ Menurut Marzuki bahwa konsep nilai dalam *siri'* ada dua yakni nilai malu dan nilai harga diri (martabat).

Perang Makassar yang berlangsung antara kesultanan Makassar dengan VOC Belanda bisa dikatakan bahwa faktor budaya (*siri'*) menjadi salah satu pemicunya. Penyerahan pulau Muna kepada Buton oleh kesultanan Ternate atas pengaruh Belanda yang mengakibatkan Buton menduduki pulau Muna. Tindakan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan seizin Sultan Hasanuddin, oleh Makassar hal demikian dipandang sebagai sebuah pencorengan terhadap *siri'* (harga diri/martabat) kebesaran Makassar karena pulau Muna adalah wilayah kekuasaan Makassar. Hal tersebut membuat Sultan Hasanuddin murka dengan mengirim ratusan armada perang dibawah pimpinan Laksamana Karaéng Bontomarannu untuk menyerang Buton kemudian Ternate. Penyerangan Makassar ke Buton ini juga melibatkan Belanda membantu Buton. Perang tersebut merupakan salah satu episode Perang Makassar.

Di dalam lontarak disebutkan bahwa, ada enam macam perbuatan yang menyebabkan pemakluman perang oleh penguasa karena hal tersebut dianggap sebagai pencorengan terhadap martabat kehormatan penguasa (*pada riposiri' muwa*) diantara perbuatan tersebut adalah, penyerangan atau pendudukan negeri sahabat suatu kerajaan tanpa pemberitahuan sebelumnya dan meskipun ada pemberitahuan jika tidak disetujui sama saja.⁷

3. Kondisi Ekonomi

Pada dasarnya, mata pencaharian suatu masyarakat bergantung pada potensi alam di sekitarnya. Kondisi geografis yang telah dipaparkan sebelumnya memberikan sejumlah potensi: pertanian, peternakan, kehutanan, dan pertambangan. Sedangkan sumber daya laut dan danau memberikan potensi perikanan, pertambangan dan pelayaran atau perdagangan maritim.

Bagi penduduk yang tinggal di daerah pesisir, mereka menjadi nelayan penangkap ikan dan membuka empang-empang untuk perikanan dan hasil tangkapan ikan mereka diperdagangkan ke daerah pegunungan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bram Morris sebagai berikut:

Penangkapan ikan memegang peranan penting dan memberikan sumber pendapatan yang berlimpah kepada penduduk pantai. Selain melalui sarana

⁶A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, h. 138-139.

⁷Andi Muhammad Ali, *Lontarak Boné*, h. 4.

jalan yang dibawa orang dengan perahu kecil ke laut dan dilempar di sana, perikanan di sepanjang pantai dikelola dengan menempatkan buluh dan sero. Secara rutin setiap tahun beberapa ratus pikul ikan kering atau ikan asin diekspor ke kerajaan-kerajaan Massenrempulu.⁸

Selain usaha penangkapan ikan, aktivitas masyarakat di wilayah pesisir memanfaatkan laut sebagai sarana pelayaran dan perdagangan maritim. Masyarakat Bugis-Makassar dikenal memiliki peranan penting dalam pelayaran dan perdagangan antar pulau. Eksistensi mereka dicatat oleh orang-orang Eropa yang datang ke Nusantara. Tome Pires pada abad XVI M. sebagaimana uraian terdahulu mencatat tentang hal tersebut, dan juga Josef Conrad yang melakukan lima kali pelayaran pada tahun 1887 M antara Singapura dan Kalimantan Timur, Banjarmasin, Balikpapan, Pulau Laut dan Sulawesi Barat mencatat tentang keberadaan orang-orang Bugis di pelabuhan-pelabuhan yang dimasukinya dari Singapura sampai Bulungan karena menurutnya bahwa orang-orang Bugis itu ditemukan dimana-mana di Nusantara dan Malaya.⁹

Masyarakat Sulawesi Selatan berlayar ke luar daerah untuk menjajakan hasil alam dan produksi mereka. Selain beras yang berkualitas bagus, komoditi dagang lainnya adalah produksi masyarakat setempat seperti tali dan kain layar dari daerah Mandar, sarung sutera dari Mandar dan Wajo.¹⁰ Terkait dengan barang dagangan masyarakat Sulawesi Selatan, Tome Pires menulis sebagai berikut:

Mereka membawa beras yang putih sekali dan sedikit emas. Mereka membawa pulang kain bertangis, kain dari Cambai dan sedikit dari Bengala dan Keling bersama banyak luban jawi dan dupa.¹¹

Salah satu hal juga yang menarik dengan dunia perdagangan masyarakat Sulawesi Selatan adalah kepandaian mereka menyenangkan hati penguasa negeri yang dikunjungi sehingga melancarkan usaha dagang mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh van der Chijs sebagai berikut:

(Ia) setiap tahun menyediakan beras, pakaian dan segala sesuatu yang disenangi di sana (Banda) agar dapat mengumpulkan pala sebanyak mungkin bagi negerinya, sehingga memikat sejumlah pedagang serta dapat memborong dalam jumlah besar, (ia) juga tahu bagaimana memberikan hadiah kepada ulama Banda agar dapat mengeruk keuntungan besar.¹²

Dalam pelayaran dan perdagangan maritim, mereka (masyarakat Sulawesi Selatan) juga membentuk koloni dagang. Hal tersebut digambarkan oleh Belanda:

⁸ Muhammad Amir, *Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke-16*, h. 21.

⁹PH. O. L. Tobing dkk, *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sul-Sel, 1977), h. 19.

¹⁰Edward L. Poelinggomang, *Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat*, h. 21

¹¹Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI-XVII*, h. 17.

¹²Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX; Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*, h. 29.

de Boegineezen, hoezeer stoute zeevaarders en geode kolonisten...(orang Bugis pelaut gagah berani dan penduduk baru/koloni yang baik...).¹³

Pelayaran dan perdagangan masyarakat Sulawesi Selatan memegang peranan penting bagi perekonomian masyarakat setempat sebelum kedatangan bangsa Belanda di Nusantara. Semangat pelayaran dan perdagangan masyarakat Sulawesi Selatan tentu saja di dukung oleh kondisi Makassar yang menjadi pusat perdagangan internasional pada abad XVII M. Di bandar dagang Makassar dibuka perwakilan dagang dari berbagai bangsa, diantaranya: Portugis, Inggris, Spanyol, Denmark, China, dan Belanda.¹⁴

Selain pedagang-pedagang asing tersebut, tentu juga terdapat pedagang-pedagang Nusantara yang meramaikan bandar Makassar. Hal tersebut tercatat dalam Lontarak Patturiolongnga ri tu Gowaya bahwa pada masa pemerintahan I Manrio Gau Daeng Bonto Tunipallangnga Ulaweng, telah datang perwakilan pedagang Jawa bernama Anakkoda Bonang agar diberi izin tinggal di Makassar. Dalam lontarak disebutkan sebagai berikut:

Dialah yang memberi tempat kediaman kepada orang Jawa yang disebut Anakkoda Bonang. Adapun persembahannya kepada raja ketika meminta tempat kediaman, adalah: satu *kamalatei*, delapan puluh junjungan *belo*, sekayu sekelat, sekayu *bilu'lu'*, setengah kodi cinde.¹⁵

Adapun pelayaran dan perdagangan masyarakat Sulawesi Selatan terekam oleh Tome Pires dalam perjalanannya dari Malaka ke laut Jawa pada tahun 1513 M yang bertemu dengan pelaut-pelaut Makassar. Sehubungan dengan hal tersebut Tome Pires menulis: Orang-orang Makassar telah berdagang sampai ke Malaka, Jawa, Borneo, neegri Siam dan juga semua tempat yang terdapat antara Siam dengan Pahang.¹⁶

Agama Islam yang diterima oleh masyarakat Sulawesi Selatan pada awal abad XVII M. tentu juga memberikan pengaruh kepada masyarakat setempat dalam semangat dagang. Mengingat, pertama; para penyebar Islam di Nusantara pada umumnya adalah para pedagang Islam, termasuk di Sulawesi Selatan. Tiga

¹³J. Paulus, *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, (Edisi Kedua, Volume 1: A-G, 's-Gravenhage & Leiden: Martinus Nijhoff & N.V.V/H.E.J. Brill, 1917), h. 324; Andi Faisal Bakti (ed.), *Diaspora Bugis di Alam Melayu*, (Cet. I, Makassar: Innawa, 2010), h. 148.

¹⁴Terkait dengan kedatangan dan perwakilan dagang bangsa asing di bandar Makassar, baca: Suriadi Mappangara & Irwan Abbas, *Sejarah Islam Sulawesi Selatan*, h. 49-66; Edward L. Poelinggomang, *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim* (Cet. I, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), h. 28; Syamsuez Salihima, "Peta Politik di Sulawesi Selatan pada Awal Islamisasi". *Rihlah*, no. 2 (2015), h. 40.

¹⁵Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)*, h. 83; Abd Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa*, (Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993), h. 26-27.

¹⁶Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa (Abad XVI sampai Abad XVII)*, h. 72.

datuk penyebar Islam di Sulawesi Selatan abad XVII M. (Datuk ri Pattimang, Datuk ri Bandang, dan Datuk ri Tiro) datang ke wilayah setempat atas undangan para pedagang Islam Melayu yang telah menetap di Sulawesi sebelumnya.¹⁷ Kedua; di dalam agama Islam, terdapat banyak anjuran tentang kutamaan berdagang. Bahkan, Nabi Muhammad saw. sendiri pada masa hidupnya pernah menjadi seorang pedagang.

Ketenaran pelayaran dan perdagangan masyarakat Sulawesi Selatan pada abad XVII M. tentu saja menjadi saingan bagi VOC yang datang ke Nusantara. VOC merupakan sebuah maskapai dagang bangsa Belanda yang berusaha memonopoli perdagangan di Nusantara. Untuk memperkuat monopoli ekonominya tersebut, maka ia harus mengendalikan jalur-jalur laut. Hal tersebut tentu menjadi salah satu sumber konflik dengan pelayar/pedagang Makassar yang pada puncaknya memicu Perang Makassar pada abad XVII M.

4. Kondisi Politik

Di wilayah Sulawesi Selatan, pada umumnya kerajaan-kerajaan lokal melakukan persekutuan untuk membentuk kekuatan yang lebih besar guna mempertahankan diri atau menghadapi musuh bersama. Masing-masing kerajaan melakukan persekutuan dengan kerajaan lainnya untuk mempertahankan diri dari musuhnya masing-masing. Salah satu karakter kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yaitu sangat suka berperang. Bangsa Belanda yang pernah berkuasa di wilayah setempat menjulukinya *de onrust eiland* (pulau kerusuhan).¹⁸

Kekuatan-kekuatan politik atau persekutuan-persekutuan politik di Sulawesi Selatan pada akhirnya dikuasai oleh Kesultanan Makassar pada dasawarsa awal abad XVI M. sehingga pada waktu tersebut Makassar menjadi pemegang hegemoni di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Hegemoni Makassar tersebut menimbulkan ketidak-puasan dari beberapa kerajaan yang mengobarkan perlawanan sengit melawan Makassar. Perlawanan tersebut berasal dari Kerajaan Boné dan Soppéng dibawah pimpinan La Tenri Tatta Arung Palakka. Perlawanan tersebut kelak melibatkan Kompeni Belanda bersama-sama dengan La Tenri Tatta mengobarkan peperangan dengan Kesultanan Makassar yang dalam literatur sejarah dikenal dengan Perang Makassar 1666-1669 M.

Dengan demikian dari sudut pandang politik dapat dipahami bahwa, peristiwa Perang Makassar terjadi bukan hanya karena persaingan antara

¹⁷Hal tersebut tercatat dalam lontarak koleksi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sul-Sel Rol 02 No. 08, h. 176; *Naiyaro Malajué mafeddi' atinna mitai Mangkasa' Ogi'é dénafa maselleng nasamannato maélo Kayésuite. Afa' iyaro wettué bangsa Paretugisi'é sibawa siagaé bangsa Éropa laing naengka mémeng toni ri Hindiya mabbalu.* Orang-orang Melayu risau hatinya melihat orang Makasar dan Bugis belum memeluk Islam, sekaakan-akan hendak memilih Jesuit (Kristen) karena pada saat itu bangsa Portugis dan bangsa Eropa lainnya telah datang di Hindiya untuk berdagang)

¹⁸Mukhlis Paeni. *Membaca Manusia Bugis-Makassar*, (CV. Gisna Multi Mandiri Makassar bekerjasama dengan Kurnia Kalam Semesta Yogyakarta, 2014), h. 218.

kesultanan Makassar dengan VOC dalam perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku atau karena skenario Belanda dalam politik *divide impera* (pecah belah) memecah belah antara Bugis-Makassar. Kenyataan peristiwa tersebut semestinya dipahami bahwa di balik peristiwa tersebut ada masalah politik yang mendasari kejadian Perang Makassar yakni rivalitas antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dalam memperebutkan superioritas.

Kebiasaan berperang kerajaan-kerajaan setempat merupakan persaingan untuk menjadi pemegang hegemoni di Sulawesi Selatan. Sebagai refleksi dari perebutan kekuasaan/hegemoni diantara kerajaan-kerajaan lokal tersebut maka, kultur politik kerajaan lokal pada saat itu adalah membentuk/menjalin persekutuan, sehingga dalam kesejarahan Sulawesi Selatan dikenal banyak konfederasi kerajaan lokal.

Kekuatan-kekuatan politik atau persekutuan-persekutuan politik di Sulawesi Selatan pada akhirnya dikuasai oleh Kesultanan Makassar pada dasawarsa awal abad XVI M. sehingga pada waktu tersebut Makassar menjadi pemegang hegemoni di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Hegemoni Makassar tersebut menimbulkan ketidak-puasan dari beberapa kerajaan yang mengobarkan perlawanan sengit melawan Makassar. Perlawanan tersebut berasal dari Kerajaan Boné dan Soppéng dibawah pimpinan La Tenri Tatta Arung Palakka. Perlawanan tersebut kelak melibatkan Kompeni Belanda bersama-sama dengan La Tenri Tatta mengobarkan peperangan dengan Kesultanan Makassar yang dalam literatur sejarah dikenal dengan Perang Makassar 1666-1669 M.

Dengan demikian dari sudut pandang politik dapat dipahami bahwa, peristiwa Perang Makassar terjadi bukan hanya karena persaingan antara kesultanan Makassar dengan VOC dalam perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku atau karena skenario Belanda dalam politik *divide impera* (pecah belah) memecah belah antara Bugis-Makassar. Kenyataan peristiwa tersebut semestinya dipahami bahwa di balik peristiwa tersebut ada masalah politik yang mendasari kejadian Perang Makassar yakni rivalitas antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan dalam memperebutkan superioritas.

B. Proses Kejadian Perang Makassar

1. Awal Perang Makassar

Kenyataan-kenyataan sebelumnya merupakan faktor tidak langsung yang mengarah kepada konflik antara VOC dengan Kesultanan Makassar. Konflik tersebut merupakan konflik laten antara kedua pihak. Konflik laten tersebut menjadi konflik terbuka pada tahun 1615 M., ketika terjadi insiden penipuan terhadap beberapa bangsawan Makassar yang dikenal dengan peristiwa Enkhuisen. Peristiwa tersebut terjadi ketika datang kapal VOC bernama Enkhuisen berlabuh di pelabuhan Makassar. Kapten kapal dan Abraham Sterck

dan De Vries (komisaris VOC di Makassar) mengundang beberapa pembesar kerajaan Gowa untuk beramah-tamah dan perkenalan di atas kapal. Tanpa ada rasa curiga bangsawan Makassar yang diundang datang dengan pengiringnya. Ketika pembesar dan pengikut-pengikutnya berada di atas kapal mereka diserang dan ditawan.

Hal demikian menimbulkan kebencian dan permusuhan dari orang Makassar terhadap Belanda, dan peristiwa tersebut dianggap pernyataan permusuhan Belanda terhadap Kesultanan Makassar. Satu tahun setelah peristiwa Enkhuisen, sebuah kapal Belanda bernama De Endracht berlabuh di Makassar. Awak kapal De Endracht yang naik ke daratan diamuk oleh orang Makassar yang menyebabkan semua awak kapal tersebut tewas. Peristiwa pembunuhan awak kapal De Endracht tersebut oleh Gubernur Jenderal Belanda Jan Pieterszoon Coen dianggap sebagai pengumuman perang terbuka oleh Makassar terhadap Belanda.

Menanggapi hal demikian, Makassar giat memperluas wilayah pengaruhnya ke daerah-daerah yang menjadi route pelayaran dan perdagangan ke Maluku, diantaranya penaklukan Kutai di Kalimantan Timur, penaklukan Bima dan sekitarnya pada tahun 1618 M. di Nusa Tenggara¹⁹ dan pengiriman armada Makassar ke Kepulauan Maluku untuk membantu masyarakat setempat mengusir VOC.

Upaya penaklukan Bima merupakan upaya kesultanan Makassar memperluas wilayah pengaruh dalam menghadapi ancaman penetrasi Belanda di Nusantara yang telah terang-terangan menyatakan konflik terbuka terhadap Makassar dengan adanya peristiwa Enkhuisen yang telah disebutkan sebelumnya. Upaya Makassar tersebut menimbulkan terseirnya agama Islam di Bima dan sekitarnya

Menurut cerita rakyat setempat (Bima) bahwa raja Bima yang mula Islam adalah Sultan Abdul Kahir. Pada masa pemerintahannya dua kali diserang oleh Makassar 1618 dan 1619 dan pada tahun 1621 raja Bima masuk Islam dan digelar Sultan Abdul Kahir.²⁰

Penaklukan dan pengsilaman Bima oleh Makassar tersebut kelak memberikan keuntungan bagi kesultanan Makassar karena ketika pecah Perang Makassar antara VOC Belanda dengan kesultanan Makassar, Bima dengan kekuatan penuh membantu Makassar.

¹⁹Kamaruddin dkk. *Pengkajian Transliterasi dan terjemahan Lontarak Bilang Raja Gowa-Tallok (Naskah Makassar)*, h.88.

²⁰Henri Chabert Lior & Siti Maryam (ed.), *Bo' Sangaji Kai*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. xviii. Dalam Lontarak Bilang Gowa Tallok disebutkan bahwa penaklukan Bima dipimpin oleh Lo'mo' Mandallé, ia tiba di Bima bulan April 1617 M. dan menaklukannya. Kamaruddin dkk. *Pengkajian Transliterasi dan terjemahan Lontarak Bilang Raja Gowa-Tallok (Naskah Makassar)*, h. 9.

Jadi, sejak peristiwa Enkhuisen dan De Endracht maka, hubungan antara Makassar-VOC tidak menentu, kadang memanas yang mengakibatkan bentrokan dan kadang pula diadakan perjanjian perdamaian. Kondisi tersebut mengakibatkan perang besar antara keduanya yakni pada tahun 1660 M. masa Sultan Alauddin dan pada tahun 1666 M. pada masa Sultan Hasanuddin.

Hasil dari peperangan pada tahun 1660 M. merupakan keberhasilan Belanda menduduki Benteng Pana'kukang dan ketercapaian perjanjian pada tanggal 19 Agustus 1660 M. Isi yang terpenting dari perjanjian tersebut sebagai berikut:

1. Orang Makassar selanjutnya tidak akan mencampuri lagi mengenai urusan-urusan Buton, Manado, dan Ambon.
2. Orang Makassar tidak boleh lagi mengadakan pelayaran ke Banda dan ke Ambon.
3. Orang Portugis harus meninggalkan Makassar untuk selama-lamanya.
4. Sultan harus membayar segala ongkos peperangan kepada Kompeni Belanda,
5. Selama Sultan belum menanda-tangani perjanjian ini dan melaksanakan segala apa yang tercantum dalam perjanjian ini, pasukan Belanda tetap menduduki benteng Pana'kukang yang ia telah rebut sejak tanggal 12 Juni 1660 M.²¹

Belanda terus mendesak agar Sultan Hasanuddin menjalankan isi perjanjian tersebut. Namun, Sultan Hasanuddin bersikeras tidak mau menuruti isi perjanjian tersebut terutama larangan pelayaran dan perdagangan bagi orang Makassar ke Banda dan Ambon dan pengusiran orang Portugis untuk selamanya dari Makassar. Pelarangan pelayaran dan perdagangan Makassar ke Maluku sama saja dengan mematikan pendapatan Makassar dan masyarakatnya yang mengandalkan perdagangan sebagai sumber kehidupannya. Pengusiran orang Portugis dari Makassar yang telah lama menetap merupakan tindakan pelanggaran perikemanusiaan. Akhirnya Sultan Hasanuddin menyatakan dengan tegas lebih baik berperang dengan Belanda dari pada memenuhi segala isi perjanjian yang disodorkan Belanda.²²

Pernyataan tegas Sultan Hasanuddin untuk berperang dengan VOC tersebut diperparah dengan penyitaan isi kapal Belanda De Walvis yang kandas di dekat perairan Makassar pada tahun 1662. Kemudian menyusul penyitaan isi kapal Belanda De Leeuwin yang kandas di Pulau Doang-Doang berupa, meriam dan uang, serta pembunuhan komisaris VOC Cornelis Kuyff beserta

²¹Abd. Razak Daéng Patunru, *Sejarah Gowa*, h. 37.

²²Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*, terj. Nurhady Simorok, *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*, h. 60.

empat belas anak buahnya yang memeriksa ronggokan kapal tersebut pada tahun 24 Desember 1664 M.²³ Bagi Gubernur Jenderal VOC di Batavia tindakan demikian dianggap sebagai *kasus belli*.

Pada sisi lain, pada tahun 1664 Sultan Mandarsyah dari Ternate sebagai sekutu VOC menyerahkan Pulau Pantisiano (Muna) kepada Sultan Buton dengan tidak ada persetujuan Sultan Hasanuddin. Sedangkan sebenarnya pulau tersebut termasuk kedalam wilayah kekuasaan kesultanan Makassar. Dalam kasus tersebut Belanda yang memainkan peranan. Berhubungan dengan hal tersebut Sultan Hasanuddin mengirim utusan ke Batavia untuk menyampaikan protesnya tetapi tidak mendapatkan hasil.²⁴ Sebagai balasan dari tindakan Ternate atas pengaruh Belanda tersebut maka, Sultan Hasanuddin mengirim ekspedisi penyerangan ke kawasan timur Nusantara yang berhasil menduduki Sula kemudian dalam ekspedisi kedua berhasil merebut menduduki Buton sebagai sekutu VOC.

Kasus-kasus tersebut menjadi sebab langsung peristiwa Perang Makassar pada tahun 1666-1669 M. Belanda menganggap Makassar telah melakukan pelanggaran serius terhadap Belanda sehubungan dengan penyitaan barang-barang dari dua kapal Belanda yang kandas di perairan Makassar beserta pembunuhan orang-orang Belanda yang memeriksa bangkai kapal tersebut. Hal ini demikian sejalan dengan Lontarak Boné yang menyatakan sebagai berikut:

Lima perihal sehingga diserang Makassar hingga bobol [benteng] Sombaopu: pertama; pembunuhan atas pengawainya [VOC] di Doang-doang, kedua; penyitaan hartanya [VOC] di Doang-doang, ketiga; penyitaan meriamnya [VOC] di Suriwa, keempat; penyerangan atas Buton oleh Makassar dan pengambilan kota Belanda di Buton, kelima; penyerangan Makassar atas Sula.²⁵

Lima point demikian yang menjadi alasan utama VOC untuk melakukan peperangan dengan Makassar di Sulawesi yang kebesaran dan kekuatannya tak terdandingi di wilayah setempat. Point-point tersebut inilah yang menjadi sebab langsung pemicu Perang Makassar yang berlangsung \pm 5 tahun menurut perhitungan hijriyah atau \pm 3 tahun menurut perhitungan masehi. Naskah tersebut menyebut secara rinci kesalahan-kesalahan Makassar terhadap VOC dan sekutu-sekutunya.

Pada sisi lain, Makassar memandang Belanda telah melakukan *céka* (kejahatan yang dapat menimbulkan peperangan) terhadap Makassar dengan memprovokasi Ternate dan Buton untuk berperang melawan Makassar sehingga Ternate atas pengaruh Belanda memprovokasi Makassar dengan menyerahkan

²³Abd. Razak Daéng Patunru, *Sejarah Gowa*, h. 40-41.

²⁴Abd. Razak Daéng Patunru, *Sejarah Gowa*, h. 41.

²⁵*Lontarak Boné*, h. 9. Diartikan secara bebas oleh penulis.

Pulau Muna kepada Buton tanpa persetujuan pihak Makassar sebagai pemegang supremasi atas Muna. Selain itu Belanda juga melindungi para pelarian dari Makassar (Arung Palakka dan pegikutnya).

Hal-hal demikian diatas dalam hukum tradisional Bugis-Makassar disebut *céka*. Adapun tindakan yang harus dilakukan sebagai balasan atas tindakan *céka* adalah perang. Hal tersebut disebutkan dalam Lontarak Boné sebagai berikut:

Enam macam (perbuatan) yang disebut oleh *toriolo* (leluhur) *céka* yang menjadi pengumuman perang oleh pemerintah. Pertama; mengubah adat-istiadat yang lazim, kedua; melanggar perjanjian, ketiga; menyerang sekutu (pihak lain) tanpa pemberitahuan dan meskipun ada pemberitahuan tetapi tidak ada persetujuan, keempat; membunuh seseorang atau sahabat tanpa hak, kelima; melukai utusan, keenam; memfinah sesamanya tomaraja (pembesar negeri). Yang demikian salah satu dari keenam tersebut menjadi pemakluman perang oleh pemerintah. Berkata pula *toriolo*: sama saja satu *céka* yang besar dengan *céka* yang kecil tetapi banyak, menjadi aib bila tidak dimaklumkan perang atas hal tersebut.²⁶

2. Keberlangsungan Perang Makassar

Dalam Perang Makassar VOC Belanda mengalami kesulitan. Kedahsyatan perang Makassar ini menurut Kruck sebagai perang yang paling berat dan sengit yang pernah dilakukan Kompeni Belanda, sehingga para serdadu Eropa barangkali tidak pernah mendengar adanya pertempuran sehebat ini di Eropa.²⁷

Namun, ujung dari peperangan dahsyat tersebut adalah keberhasilan VOC Belanda memaksa Kesultanan Makassar menerima dan mentaati Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan pihak Makassar. Selain itu, peperangan tersebut juga mengakibatkan kehancuran Benteng Somba Opu, yang di dalamnya terdapat istana Maccini Sombala yang ditopang 120 tiang dengan pintu yang berlapis emas serta jendela yang berkaca kristal seketika menjadi puing. Sultan Hasanuddin pun meninggalkan Somba Opu yang porak poranda dan bermukim di Benteng Kale Gowa, Tamalate. Sejak itu, berakhirlah kejayaan sebuah kesultanan Islam Makassar yang telah menjadi negara maritim yang kuat.²⁸ Peranannya

²⁶Lontarak Boné, h. 7-8. Diartikan secara bebas oleh penulis.

²⁷Setelah berperang selama tiga tahun baru pada pada bulan Juni 1669 M. VOC menduduki dan menghancurkan Benteng Somba Opu, benteng terkuat Kesultanan Makassar dan berhasil memaksa penguasa Makassar menerima dan patuh terhadap Perjanjian Bungaya. Anthony Reid, *Charting the shape of early modern Southeast Asia*, terj. Sori Siregar dkk.; *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan*, h. 164; Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) In the Seventeenth Century*, terj. Nurhady Simorok, *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*, h. 163.

²⁸Muchlis Paeni, "Membedah Perjanjian Bongaya" (Makalah yang disajikan pada Seminar Membedah Perjanjian Bongaya 1667 oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Republik Indonesia, Makassar, 21 Desember 2015), h. 2.

kemudian digantikan oleh sebuah imperium dagang asing saingannya VOC Belanda, yang kebetulan beragama Kristen. Padahal, menurut Anthony Reid bahwa kebesaran perdagangan maritim Makassar adalah keberhasilan yang tiada bandingnya dalam sejarah Indonesia.²⁹

Kedahsyatan Perang Makassar sebagai wujud perlawanan masyarakat Kesultanan Makassar dan Sulawesi Selatan lainnya dalam menghadapi bangsa asing (VOC Belanda) merupakan implementasi suasana masyarakat Makassar membangun pandangan hidup yang didasarkan pada ajaran Islam.³⁰ Peristiwa tersebut, mewarnai sejarah perjalanan masyarakat Kesultanan Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan secara umum yang telah menerima agama Islam sekitar lima puluh tahun sebelumnya.

3. Kemunduran Perang Makassar dan Perjanjian Perdamaian

Pada awalnya, perjanjian perdamaian antara Makassar-VOC hanya terdiri dari 26 pasal, namun karena Sultan Hasanuddin belum bisa melaksanakannya maka Speelman menambahi tiga pasal. Dengan dimasukkan ketiga pasal baru tersebut maka, pada akhirnya tercapailah persetujuan damai yang terdiri dari tiga puluh pasal yang dalam kepustakaan lokal disebut *Ceppaé ri Bungaé* (Bugis)/ *Cappaya ri Bungaya* (Makassar) atau *Het Bongaisch Verdrag* dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan Perjanjian Bungaya. Adapun point dari Perjanjian Bungaya tersebut kini menjadi 29 pasal, yakni:

- a. Menyetujui Perjanjian-perjanjian pada 19 Agustus dan 21 Desember 1660.
1. Semua pegawai-pegawai bangsa Eopa (Belanda) dan rakyat Belanda yang ada di Sombaopu yang menjadi tawanan atau lari menyeberang kepada kerajaan Gowa harus diserahkan kepada Kompeni Belanda.
2. Semua barang-barang yang telah disita oleh pemerintah kerajaan Gowa yang berasal dari kapal-kapal Belanda yang pernah atau telah kandas dan dirusakkan harus diserahkan kepada Kompeni Belanda.
3. Orang-orang yang bersalah karena telah melakukan pembunuhan atas orang diri Belanda dan mereka yang telah merusakkan kapal-kapal Belanda akan dihukum di hadapan residen Belanda di Jumpandang.

²⁹Dias Pradadimara & Muslimin A.R. Effendy (ed.), *Kontinuitas & Perubahan dalam sejarah Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), h. 43.

³⁰Pada abad ke XVIII semua kerajaan besar di Nusantara menghadapi kekuatan Belanda (VOC) berada dalam suasana membangun pandangan hidup yang didasarkan pada ajaran Islam. Mattulada, *Menyusuri Jejak Makassar Dalam Sejarah*, h. 119. Bahkan, di Sulawesi Selatan sejak penerimaan Islam pada awal abad XVII M., maka Islam menjadi penghubung para pemimpin dan struktur hierarchis dalam masyarakat, batas-batas kewarganegaraan kelompok kaum dan kekerabatan serta pelapisan masyarakat menjadi semakin lunak digantikan oleh ikatan seiman dalam Islam. Mattulada, *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, (Cet. I, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 162.

4. Orang-orang yang berutang kepada orang Kompeni harus membayar lunas segala utangnya dalam tempo satu tahun.
5. Orang-orang Portugis dan orang-orang Inggris harus meninggalkan Makassar sebelum akhir tahun. Sultan tidak boleh meluaskan bangsa-bangsa Eropa lain berdagang di dalam daerah kerajaannya, pu tidak boleh menerima duta-duta dari mereka itu.
6. Hanya kepada Kompeni saja diberikan hak untuk menjual di Jumpandang barang-barang impor yang penting. Pelanggar-pelanggar hukum akan dihukum dan barang-barang yang bersangkutan akan disita untuk kepentingan Kompeni. Kain-kain yang dibuat di daerah-daerah pesisir timur dari Jawa tidak termasuk dalam larangan itu.
7. Kompeni bebas dari semua bea dan kewajiban-kewajiban pada pemasukan dan pengeluaran barang-barang.
8. Orang-orang Makassar tidak boleh berlayar selain dari pada ke Bali, Jawa, Betawi, Bantam, Jambi, Palembang, Johor dan Borneo, untuk mana mereka harus mempunyai surat pas.
9. Benteng-benteng pertahanan Barombong, Pana'kukang, Garassi, Mariso dan lain-lainnya harus dirombak. Juga tidak boleh, dimana pun, didirikan benteng pertahanan baru. Hanya benteng Sombaopu yang besar itu akan tinggal untuk kerajaan Gowa.
10. Benteng Jumpandang bersama perkampungan dan tanah yang termasuk lingkungannya diserahkan kepada Kompeni. Loji Kompeni akan didirikan kembali.
11. Mata uang Belanda berlaku di Jumpandang.
12. Sultan akan membayar kepada Kompeni ongkos perang sebesar 250.000 ringgit, ditambah dengan denda yang terdiri dari 1000 orang budak laki-laki dan perempuan yang muda, sehat dan dewasa atau uang sejumlah harga dari budak-budak tersebut.
13. Kerajaan Gowa harus menyerahkan Bima dan daerah-daerah taklukannya kepada Kompeni.
14. Sultan akan berusaha menyerahkan raja Bima, raja Dompu, raja Tambora dan raja Sanggar yang semuanya telah mengadakan pembunuhan kepada orang-orang Belanda di Bima. Juga Karaéng Bontomarannu harus diserahkan kepada Kompeni.
15. Sultan harus melepaskan segala haknya atas Buton.
16. Sultan harus melepaskan segala haknya atas pulau-pulau Sula dan lain-lain pulau yang termasuk kekuasaan Ternate, seperti: Selayar, Muna dan seluruh daerah-daerah di pesisir timur Sulawesi, yaitu mulai dari Sanana sampai Manado, kepulauan Banggai, Gapi dan lain-lainnya yang terletak

- antara Mandar dan Manado, seperti Lambagi, Kaidipan, Buwol, Toli-Toli, Dampelas, Balaisang, Solengsak dan Kaili.
17. Pemerintah kerajaan Gowa harus melepaskan kekuasaannya atas kerajaan Boné dan kerajaan Luwu dan harus berjanji untuk memerdekakan Datu Soppéng dari pengasingannya.
 18. Pemerintah kerajaan Gowa selanjutnya akan mengakui raja Laiya dan Bangkala bersama seluruh Turatéa dan Bajéng dan daerah taklukannya, yang kesemuanya sementara dalam peperangan telah datang kepada Kompeni, sebagai raja-raja yang bebas tanpa penguasaan atas mereka.
 19. Semua negeri yang dalam peperangan dikalahkan oleh Kompeni bersama sekutu-sekutunya, terhitung mulai Bulu-Bulu sampai Bungaya akan menjadi dan tetap sebagai negeri-negeri milik yang telah dimenangkan oleh Kompeni bersama sekutu-sekutunya menurut hukum perang, kemudian bilamana Arung Bakke dan Arung Appanang datang maka negeri-negeri tersebut akan diperlakukan sesuai dengan hak Kompeni atas daerah-daerah di sebelah utara Makassar.
 20. Pemerintah Kerajaan Gowa menyatakan akan melepaskan haknya atas Wajo, Bulu-Bulu, dan Mandar yang kesemuanya dianggap durjana terhadap Kompeni dan sekutu-sekutunya dan negeri-negeri tersebut akan diperlakukan oleh Kompeni dan sekutu-sekutunya menurut kehendak Kompeni.
 21. Pemerintah kerajaan Gowa akan menutup negerinya untuk bangsa-bangsa lain. Bilamana pemerintah kerajaan Gowa tidak mampu menolak mereka itu tinggal Jumandang, maka pemerintah kerajaan Gowa akan meminta bantuan Kompeni yang ia akui sebagai pelindungnya dengan kewajiban selanjutnya, bahwa ia akan membantu Kompeni terhadap musuh-musuh Kompeni dan ia tidak akan mengadakan permusyawaratan-permusyawaratan dengan negara-negara yang berperang dengan Belanda.
 22. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, maka dibuatlah oleh Sultan bersama pembesar-pembesar kerajaannya suatu perjanjian perdamaian, persahabatan dan persekutuan, di dalam mana termasuk raja-raja dari Ternate, Tidore, Bacan, Buton, Boné, Soppéng, Luwu, Turatéa, bersama daerah-daerah taklukannya, begitupun Bima dengan tuan-tuan tanah dan raja-raja yang kemudian meminta masuk dalam persekutuan ini.
 23. Kompeni akan mengambil keputusan di dalam perselisihan-perselisihan diantara anggota-anggota sekutu. Bilamana ada satu pihak tidak mau mengindahkan perantara yang diberikan Kompeni, maka semua anggota sekutu memberikan bantuan kepada yang lain.
 24. Dua orang terkemuka dari majelis pemerintahan di Gowa akan berangkat bersama Speelman ke Betawi untuk meminta pengesahan dari Gubernur

- Jenderal atas perjanjian tersebut. Gubernur Jenderal jika dikehendaki akan disuruh tinggal di Betawi dua orang putera dari Sultan sebagai jaminan.
25. Untuk mewujudkan apa yang ditetapkan pada pasal 6, Kompeni akan angkut orang-orang Inggris bersma barang-barangnya ke Betawi.
 26. Untuk mewujudkan apa yang ditetapkan pada Pasal 15, maka bilamana dalam tempo sepuluh hari raja Bima Karaéng Bontomarannu tidak terdapat dan diserahkan Kompeni putera-putera mereka harus diserahkan kepada Kompeni.
 27. Sultan berjanji akan membayar kepada Kompeni 250.000 ringgit sebagai pembayaran ongkos perang yang harus dilunasi dalam lima musim berturut-turut.
 28. Perjanjian ini ditanda-tangani di atas sumpah pada hari Jumat tanggal 18 November 1667 di Bungaya.³¹

C. Eksistensi Umat Islam Pasca Perang Makassar

1. Supremasi VOC Belanda di Sulawesi Selatan

Setelah Kompeni Belanda memporak-porandakan dan meratakan dengan tanah Benteng Sombaopu sebagai benteng perlawanan terakhir Kesultanan Makassar. Maka, dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan yang menjadi pendukung cengkeraman hegemoni Kompeni Belanda atas masyarakat dan kerajaan setempat. Hal tersebut diwujudkan melalui Perjanjian Bungaya yang menjadi alat legitimasi hegemoni Kompeni Belanda bagi masyarakat dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan yang telah menerima Islam secara umum pada awal abad XVII M. Dengan demikian, melalui Perjanjian Bungaya, dasar kekuasaan Kompeni Belanda telah tertanam di kawasan timur Nusantara khususnya di Sulawesi Selatan.

Perjanjian Bungaya tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri Perang Makassar yang telah banyak menelan korban jiwa dan materi. Bahkan, sampai menimbulkan tragedi kemanusiaan, yakni tragedi laut Liwuto dan pembuihangan Sombaopu dan Tosora. Perang tersebut terjadi karena persaingan kepentingan antara keduanya (Makassar-VOC) yang sama-sama ingin menguasai jalur perdagangan rempah di kawasan timur Nusantara. Sebelum Perang Makassar, jalur perdagangan rempah-rempah berada dibawah kontrol kekuasaan Kesultanan Makassar yang berpusat di Sombaopu.

Makassar yang menguasai jalur pelayaran dan perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara sebagai pengaruh dari agama Islam yang dianutnya pada awal abad XVII M. menganut sistem pelayaran dan perdagangan

³¹Abd. Razak Daéng Patunru, *Sejarah Gowa*, h. 50-55; Suriadi Mappangara (ed.), *Ensiklopedia Tokoh dan Peristiwa Sejarah Sulawesi Selatan*, (Makassar: Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sul-Sel, 2012), h. 355-357.

bebas bagi semua bangsa (*mare liberium*). Dengan kebijakan tersebut, bandar Makassar tampil sebagai bandar yang banyak dikunjungi oleh berbagai bangsa di dunia untuk berdagang. Beramai-ramailah pedagang-pedagang Eropa (Portugis, Spanyol, Inggris, Denmark, dan lain-lain) Arab, Indian, China membuka kantor perwakilan dagang di Sombaopu.

Kebijakan *mare liberium* tersebut berbanding terbalik dengan sistem yang dianut oleh VOC yang menerapkan sistem monopoli pelayaran dan perdagangan; hanya bangsa Belanda saja yang dapat melakukan pelayaran dan perdagangan. Hal tersebut menjadi sebuah pemicu konflik yang menimbulkan peperangan antara VOC yang kuat melawan Kesultanan Makassar yang tangguh yang berakhir dengan Perjanjian Bungaya yang tentu saja sangat menguntungkan VOC dan sangat merugikan Makassar dan masyarakatnya. Melalui perjanjian tersebut VOC tampil menghegemoni ekonomi dan politik di Sulawesi Selatan.

2. Tarikat dan Perkembangan Mesianisme

Demikianlah penetrasi kekuasaan Kompeni Belanda di Sulawesi Selatan pasca Perang Makassar semakin kuat. Dalam menghadapi pengaruh penetrasi Kompeni Belanda tersebut sebagian masyarakat Sulawesi Selatan mempunyai cara-cara untuk membuat reaksi sendiri sebagai respon atas kondisi tersebut. Respon tersebut tentu saja diharapkan mampu mengembalikan kondisi seperti semula atau memberikan ketenangan kepada mereka. Adapun jenis respon atas hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, gerakan sekte keagamaan yang memuat kegiatan-kegiatan yang bertujuan agar masyarakat lebih rajin menjalankan kewajiban agamanya (Islam). Mereka melepaskan diri dari ikatan-ikatan keduniaan yang berhubungan dengan kekuasaan dan Kompeni Belanda dengan memasuki dunia tarikat. Mereka mendiami daerah-daerah yang berada diluar jangkauan formal penguasa Kompeni Belanda dengan membentuk ikatan-ikatan persaudaraan spiritual dalam berbagai pengamalan tarikat.

Hal tersebut menurut Muchlis Paeni memupuk perkembangan berbagai tarikat di Sulawesi Selatan. Sehingga naskah-naskah tarikat Naksabandiah, Halwatiyah, dan tarikat Syatariyah serta ajaran-ajaran wajudiah menyebar sampai ke pelosok-pelosok desa di pedalaman Makassar, di Sanroboné, Sorabaya, Laguruda, Galésong, Béba, Batang Kaluku, Patani, Garassi, Bontojé'né, Lanna, dan lain-lain.³²

Jadi, masyarakat setempat secara spiritual masuk dan bersembunyi ke dalam pengamalan tarikat, menghindari hiruk pikuk yang berkaitan dengan politik. Hal tersebut bukan hal baru dalam sejarah umat Islam. Hal seperti demikian

³²Muchlis Paeni, "Membedah Perjanjian Bongaya" (Makalah yang disajikan pada Seminar Membedah Perjanjian Bongaya 1667 oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya Republik Indonesia, Makassar, 21 Desember 2015), h. 6.

dapat ditemukan pada kelompok Murjia'ah dalam sejarah pemikiran Islam. Kelompok Murjia'ah adalah kelompok yang tidak mau melibatkan diri di dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi antara kelompok Syi'ah, Khawarij dan kelompok pendukung Mua'wiyah dari Bani Umayyah.³³ Pertentangan-pertentangan tersebut pada mulanya adalah persoalan kepemimpinan (politik) dan pada akhirnya merembes pada ranah keagamaan. Murjia'ah tentu saja tidak mau terlibat saling mengkafirkan sesama muslim, apalagi terlibat dalam kehidupan politik.

Setelah Makassar secara khusus dan Sulawesi Selatan secara umum berada di bawah kendali politik penguasa Belanda yang senantiasa berusaha menempatkan Belanda sebagai pertuanan tunggal di Sulawesi Selatan karena kondisi masyarakat Sulawesi Selatan menjadi lemah. Hal demikian, membuat sebagian masyarakat yang memiliki kemampuan mobilitas, melakukan eksodus keluar daerah. Para ulama dan cendekiawan berusaha mencari tempat yang aman untuk melanjutkan dan mempertahankan kegiatannya. Ajaran-ajaran atau pengetahuan keagamaan Islam dilanjutkan di tempat yang aman atau terpencil. Pendidikan Agama Islam tersebut pada umumnya lebih bersifat pada aspek kebatinan atau tarekat yang banyak diminati oleh anak muda atau para bangsawan.³⁴

Pelarian mereka kepada pendalaman tarikat atau aliran kebatinan yang bersifat mistik di daerah-daerah pedalaman bisa dipahami sebagai respon umat Islam atas kemerosotan eksistensi mereka pasca Perang Makassar. Umat Islam Sulawesi Selatan ingin mendapatkan ketenangan melalui pendalaman tarekat atau mistisme Islam dari kondisi kemerosotan mereka dari dominasi politik Kompeni Belanda di Sulawesi Selatan.

3. Migrasi Keluar Daerah

Kemenangan VOC atas Makassar menimbulkan arus pengungsi keluar daerah Sulawesi Selatan luar biasa banyak. Hal tersebut digambarkan oleh Leonard Y. Andaya sebagai berikut:

Kelompok-kelompok yang melakukan migrasi ke seberang sering begitu banyak hingga armada mereka menyerupai kota terapung. Jumlah dan mobilitas pengungsi di Nusantara dilihat sebagai suatu unsur ketidakstabilan di wilayah ini.³⁵

³³Harun Nasution, *Teologi Islam; Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2013), h. 24-25.

³⁴Mattulada, *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, (Cet. I, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998), h. 299.

³⁵Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*, terj. Nurhady Simorok, *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*, h. 162.

Setelah penghancuran Sombaopu pada tahun 1669 M. Kompeni Belanda Arung Pakakka juga melakukan penghancuran Tosora dan sekitarnya, pusat pemerintahan Kerajaan Wajo yang mengakibatkan Arung Matowa Wajo La Tenri Lai Tosengngeng gugur. Hal demikian tentu saja menambah pertumbuhan arus masyarakat Sulawesi Selatan keluar daerah ke berbagai wilayah di Nusantara. Sehubungan dengan hal tersebut lontarak menyebutkan sebagai berikut:

Demikianlah masyarakat Wajo keluar daerah menyebar meninggalkan kampung halamannya ke daerah yang jauh. Demikian pula permulaan ada masyarakat Wajo berpikiran membeli komoditi dagang di Wajo lalu dibawa ke Jawa, dan membeli komoditi dagang di Jawa lalu dibawa pulang ke Wajo asalkan ada yang bisa memberikan laba.³⁶

Meninggalkan negeri untuk mendapatkan kebebasan dari pemerintahan yang menindas atau kurang memperhatikan kesejahteraan masyarakat adalah sesuatu yang lazim dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Hal seperti demikian dalam masyarakat Sulawesi Selatan disebut dengan *mallékké dapureng*.

Diantara para pengungsi tersebut yang bertekad untuk terus melakukan perlawanan terhadap VOC Belanda dan tidak mengakui Perjanjian Bungaya adalah kelompok yang dipimpin Karaéng Tallo; Sultan Abdul Rasyid, Karaéng Galésong; putera Sultan Hasanuddin, Karaéng Bontomarannu; *tumabbicara butta Gowa*. Mereka meninggalkan Sulawesi guna membantu kesultanan Banten yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan VOC Belanda.

Namun, motivasi lain masyarakat Bugis-Makassar keluar daerah tentu saja dimotivasi juga oleh keinginan untuk memperbaiki nasib. Semangat untuk memperbaiki nasib diri dan negeri bagi masyarakat Sulawesi Selatan merupakan sebuah panggilan jiwa yang dalam budaya masyarakat setempat disebut *siri'*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Abu Haif dalam penelitian disertainya bahwa; orang-orang Bugis-Makassar selalu berupaya mencari tempat yang dianggap layak bagi dirinya untuk didiami, bekerja, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Motivasi migrasi yang dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan tersebut juga dimotivasi budaya *siri*; yang menjadi pandangan hidup mereka.³⁷

Tentu saja bukan hanya para tokoh tersebut di atas yang melakukan perantauan karena dorongan budaya *siri'* untuk memperbaiki nasib atau negeri mereka. Masih banyak tokoh-tokoh lainnya, diantaranya keturunan Opu Tenri Borong Daéng Rilaka yang berjumlah lima orang, sehingga kelimanya lazim disebut Opu Lima Bersaudara. Kelima orang tersebut adalah, Opu Daéng Parani,

³⁶Lontarak Wajo (Tawang Matellué), h. 338. Diartikan secara bebas oleh penulis.

³⁷Abu Haif, *Ritual Dalam Tradisi Mappanre Tasi Nelayan Bugis di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, "Disertasi", (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), h. 51.

Opu Daéng Manambong, Opu Daéng Maréwa, Opu Daéng Celak, dan Opu Daéng Kamasé. Kelima *opu*³⁸tersebut datang mengadu nasib di sekitar perairan Selat Malaka, dan melibatkan diri dalam kemelut politik di wilayah setempat. Pada saat tersebut di Riau Lingga, Pahang, dan Johor sedang terjadi konflik perebutan tahta. Keempat negeri tersebut berada di bawah kekuasaan Sultan Sulaimān Badarul `Alam Syah dan kerajaan tersebut merupakan kelanjutan kesultanan Malaka yang dihancurkan Portugis pada tahun 1511 M.

Dalam usaha mengadu nasib di perairan Selat Malaka tersebut, Daéng Manambong berhasil menggapai kesuksesan dengan pengangkatan dirinya sebagai sultan di kesultanan Mémpawah dengan mendapat gelar Pangeran Emas Suryanegara. Daéng Kamasé berhasil menjadi Raja Muda di Sambas dengan mendapatkan gelar Pangeran Mangkubumi. Daéng Parani wafat dalam usahanya memerangi Raja Kecil dari Minangkabau yang berambisi menjadi sultan Johor. Daéng Maréwa diangkat menjadi Yamtuan Muda di Riau dan setelah kewafatannya digantikan oleh adiknya, Daéng Tjelak sebagai Yamtuan Muda kesultanan Riau.³⁹

D. Kesimpulan

Perang Makassar yang berlangsung pada tahun 1666-1669 M. yang berakibat kekalahan kesultanan Makassar oleh Kompeni Belanda, kelak sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Hal tersebut oleh sebagian masyarakat diterima sebagai sebuah kekalahan sebagai takdir dari Allah SWT sehingga mereka tetap tinggal di Makassar dengan mengikuti aturan Kompeni Belanda sebagai resiko dari kekalahan perang. Adapula kelompok yang merespon hal tersebut dengan melepaskan diri dari ikatan-ikatan keduniaan yang berhubungan dengan kekuasaan dan kompeni dengan memasuki dunia tarikat. Mereka mendiami daerah-daerah yang berada diluar jangkauan formal penguasa kompeni dengan membentuk ikatan-ikatan persaudaraan spiritual dalam berbagai pengamalan tarikat. Ada pula yang kelompok yang secara ekstrim keluar daerah Sulawesi Selatan, mereka melakukan eksodus ke berbagai daerah di Nusantara untuk melanjutkan perlawanan. Namun, ada juga yang keluar daerah dengan semangat ingin memperbaiki nasib mereka agar lebih baik.

³⁸*Opu* adalah gelar kebangsawanan bagi bangsawan dari Luwu di Sulawesi Selatan. Itulah sebabnya Buya Hamka menyebut kelima *opu* tersebut sebagai anak raja Luwu. A. Moein MG., *Bunga Rampai; Menggali Nilai Sejarah dan Kebudayaan SULSELRA; Siri & Paccé*, (Ujung Pandang: SKU Makassar Press, 1977), h. 85. Adapun Kitab Tuhfat al-Nafis menyebut kelima *opu* tersebut adalah bangsawan tinggi Bugis dari Luwu (Sulawesi Selatan). Raja Ali Haji, *Tuhfat al-Nafis*, (Singapura: Malaysia Publications LTD, 1965), h. 18.

³⁹Raja Ali Haji, *Tuhfat al-Nafis*, h. 19; A. Moein MG., *Bunga Rampai; Menggali Nilai Sejarah dan Kebudayaan SULSELRA; Siri & Paccé*, (Ujung Pandang: SKU Makassar Press, 1977), h. 85.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. *Wajo Pada Abad XV-XVI; Suatu Penggalan Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan Dari Lontara*. Bandung: Alumni 1985.
- Andaya, Leonard Y. *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) In the Seventeenth Century*, terj. Nurhady Simorok, *Warisan arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. Cet. I, Makassar: Innawa, 2004.
- Amir, Muhammad, *Konfederasi Ajatappareng; Kajian Sejarah Persekutuan Antarkerajaan di Sulawesi Selatan Abad ke-16*, Makassar: De La Macca, 2013.
- Bakti, Andi Faisal (ed.), *Diaspora Bugis di Alam Melayu*, Cet. I, Makassar: Innawa, 2010.
- Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Lontarak Rol 60 No. 7.
Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Lontarak Rol 02 No. 08.
- Corteseo, Armando (ed.), *The Suma Oriental of Tome Pires An Account of The East From The Sea to China and The Book of Francisco Rodrigues*, terj. Adrian Perkasa & Anggita Pramesti; *Suma Oriental Tome Pires: Perjalanan Dari Laut Merah ke Cina & Buku Francisco Todrigues*, Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Cadwell, Ian, *Finding Cina: A New Paradigm for Early Bugis History*, *Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde* 173 (2017).
- Chabot, H. Th, *Verwantschap Stand En Sexe in Zuid-Celebes*, (Groningen-Djakarta: J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij: 1950.
- Kementerian Agama RI, *Aljamil, al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemahan Perkata, Terjemahan Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.
- Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Gibson, Thomas. *Islamic Narrative and Authority in Souteast Asia: From the 16th to 21st Century*, terj. Nurhady Sirimorok, *Narasi Islam dan Otoritas di Asia Tenggara: Abad ke -16 Hingga Abad ke-21*. Makassar: Innawa 2012.
- Gonggong, Anhar, *Abdul Qahhar Mudzakkar; Dari Patriot Hingga Pemberontak*, Cet 1, Jakarta: Grasindo, 1992.
- Gottschalk, :Louis *Understanding History: a Primer of Historical Method*, ter. Nugroho Susanto, *Mengerti Sejarah*, Cet. V, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- G., Wahyuddin, *Sejarah dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Cet. I, Makassar: UIN Alauddin University Press, 2014.

- Haif, Abu, *Ritual Dalam Tradisi Mappanre Tasi Nelayan Bugis di Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, “Disertasi”. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Hamid, Abu, *Syekh Yusuf Makassar: Seorang Ulama, Sufi dan Pejuang*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
-, *Syekh Yusuf Tajul Khalwati: Suatu Kajian Antropologi Agama*, “Disertasi”, Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1990.
- Hamid, Abd. Rahman. *Sejarah Maritim Indonesia*. Yogyakarta: Ombak 2013.
- Hamid, Abd Rahman dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Haji, Raja Ali, *Tuhfat al-Nafis*, Singapura: Malaysia Publications LTD, 1965.
- Irsan, Abdul. *Indonesia di Tengah Pusaran Globalisasi*. Cet. I, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007.
- Kamaruddin dkk. *Pengkajian Transliterasi dan Terjemahan Lontarak Bilang Raja Gowa-Tallok (Naskah Makassar)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan La Galigo, 19985/1986.
- Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Wajo, *Lontarak Akkarungeng ri Wajo Jilid I*. Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Penerbit Universitas, 1965.
- Katu, Samiang. *Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan*. Makassar: Alauddin Press 2012.
- Latif, Abd. *Para Penguasa Ajattappareng Suatu Refleksi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Lior, Henri Chabert & Siti Maryam (ed.), *Bo’ Sangaji Kai*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Lopa, Baharuddin, *Hukum Laut Pelayaran dan Perniagaan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Liebner, Horst H., “Pinisi: Terciptanya Suatu Ikon”, (Makalah Seminar Nasional yang Dipresentasikan pada Reuni Alumni Ilmu Sejarah FIB UNHAS pada Tanggal 9-11 Februari 2018 di Gedung Mattulada UNHAS, Makassar.
- Mattulada. *Latoa: Satu Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Makassar: Hasanuddin University Press, 1995.
-, *Sejarah, Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*, Cet. I, Ujung Pandang, Hasanuddin University Press, 1998.
-, *Menyusuri Jejak Makassar Dalam Sejarah*, Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1990.

- Mappasanda, H. A. M., *Massenrempulu Menurut Catatan D. F. Van Braam Morris*, Ujung Pandang: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ujung Pandang: 1991/1992.
- Marzuki, Mohammad Laica, *Siri': Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis-Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1995.
- Mappangara, Suriadi (editor). *Ensiklopedia Tokoh dan Peristiwa Sejarah Sulawesi Selatan*. Makassar: Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sulsel 2012.
- Mappangara, Suriadi dkk. *Sejarah Islam Sulawesi Selatan*. Makassar: Biro KAPP Prov. Sulsel bekerjasama dengan De Lamacca Press, 2013.
- Muhaeminah. *Tapak-Tapak Sejarah dan Arkeologi Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: De Lamacca Press, 2013.
- MG., A. Moein., *Bunga Rampai; Menggali Nilai Sejarah dan Kebudayaan SULSELRA; Siri & Paccé*, (Ujung Pandang: SKU Makassar Press, 1977
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Nabba, Andi Palloge Petta, *Sejarah Kerajaan Tanah Bone: Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir*, Sungguminasa Kabupaten Gowa: Yayasan al-Muallim, 2006.
- Najamuddin dkk, *Sulawesi Selatan Tempo Doeloe: Mozaik Sejarah Lokal*, Cet. III, Makassar: Rayhan Intermedia, 2016.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam; Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2013.
-, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (Jilid I)*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Nur, H. Azhar. *Trianca Tellompocoe Kerajaan Bone, Soppeng, Wajo*. Yogyakarta: Cakrawala Publishing 2010.
- Nur, M. Rafiuddin, *Lontara 'na Soppéng; Dari Kerajaan Kembar Menuju Kabupaten*, Cet. I, Makassar: Rumah Ide, 2007.
- Olthof, W. L., (ed.), *Punika Serat Babad Tanah Jawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi ing Taoen 1647*, terj. HR. Sumarsono, *Babad Tanah Jawi Mulai Dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647*, Cet. I [Edisi Hard Cover], Yogyakarta: PT Buku Seru, 2014.
- Patunru, Abd. Razak Daeng. *Sejarah Wajo*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan 1994.
-, *Sejarah Gowa*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993.
-, *Sejarah Bone*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1995.

- Palloge, Andi. *Sejarah Kerajaan Tanah Bone (Masa Raja Pertama dan Raja-Raja Kemudiannya Sebelum Masuknya Islam Sampai Terakhir)*. Sungguminasa, Kab. Gowa, 2006.
- Paulus, J., *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, (Edisi Kedua, Volume 1: A-G, 's-Gravenhage & Leiden: Martinus Nijhoff & N.V.V/H.E.J. Brill, 1917.
- Paeni, Mukhlis. *Membaca Manusia Bugis-Makassar*. CV. Gisna Multi Mandiri Makassar bekerjasama dengan Karunia Kalam Semesta, 2014.
-, "Membedah Perjanjian Bongaya" (Makalah yang disajikan pada Seminar Membedah Perjanjian Bongaya 1667 oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya, Makassar, 21 Desember 2015.
- Pelras, Christian. *The Bugis*, terj. Abdul Rahman Abu dkk., *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris 2006.
-/, *The Bugis; The Peoples of South-East Asia and the Pacific*, (Oxford: Blackwell Publishing, tth.
- Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Wajo, *Lontarak Latoa*.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Pradadimara, Dias & Muslimin A.R. Effendy, *Kontinuitas & Perubahan dalam sejarah Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Ombak, 2004.
- Poelinggomang, Edward L, *Makassar Abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Cet. I, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.
-, *Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat*, Cet. I, Makassar: De La Macca, 2012.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Rasdiyanah, Andi, *Latoa: Lontarak Tana Bone*, Cet. I, Makassar: UIN Alauddin University Press, 2014.
- Rahim, Abdul, *Pappaseng Wujud Idea Budaya Sulawesi Selatan*, Makassar: Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2012.
- Rahman, Nurhayati. *Kearifan Lingkungan Hidup Manusia Bugis Berdasarkan Naskah Meong Mpaloe*. Makassar: La Galigo Press, 2009.
- Rahim, H. A. Rahman. *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Reid, Anthony, *Charting the shape of early modern Southeast Asia*, terj. Sori Siregar dkk., *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara: Sebuah Pemetaan*. Cet. I, Jakarta: Pustaka LEP3ES Indonesia, 2004.

-, *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680*, terj. Mochtar Pabottingi, *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680*, Cet I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.
-, *Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief*, Ithaca: Cornell University Press: 1993.
- Renre, Abdullah. *Ibnu Khaldun: Pemikiran, Metode dan Filsafat Sejarah dalam Muqaddimah*. Cet 1, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia*, terj. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*, Cet. VI, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI Sampai Abad XVII*. Jakarta: Yayasan Obor, 2005.